

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Friends of Earth pertama kali berdiri ditahun 1971 dari 4 organisasi yang berasal dari Prancis, Swedia, Inggris dan Amerika, dan hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 75 grup yang berasal dari berbagai negara (FOEI, 2018). FOEI memiliki jalur konsultasi dengan ECOSOC (Economic And Social Council Of The United Nation) serta semua badan yang relevan di PBB, isu yang dibawa sebelumnya telah ditentukan melalui pertemuan setahun sekali bersama dengan seluruh jaringan FOEI di dunia. Tiap jaringan FOEI dimasing – masing negara membawa isunya sendiri.

Di Indonesia FOEI diwakili oleh Walhi, proses pemilahan isu diputuskan melalui rapat akbar yang dilaksanakan tiap 22 Maret, rapat akbar ini dihadiri oleh seluruh jaringan Walhi di Indonesia dengan membawa isunya masing – masing. Walhi merupakan organisasi masyarakat terbesar yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia, dengan 25 perwakilan di 25 Provinsi dan lebih dari 430 anggota. Walhi pusat sendiri bertempat di Jakarta, meski demikian setiap perwakilan di tiap – tiap kota memiliki wewenang untuk menangani suatu program kampanye ataupun kasus yang sifatnya lokal (Walhi, 2018).

Konservasi lingkungan tak bisa lepas dari dampak industri terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi keputusan yang sering ditunjukkan ke masyarakat sebagai sesuatu yang dilematis. Perusakan lingkungan sering di beri kedok dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Namun mengenyampingkan dampak buruk

dari perspektif lingkungan. Isu lingkungan sejauh ini memang masih belum menjadi perhatian utama dari pemerintah, utamanya ketika berbicara pemerintah Indonesia.

Persoalan antara pembangunan serta pelestarian alam yang ada di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Hal inipun ditegaskan oleh Walhi yang melalui hasil surveynya mengatakan bahwa kondisi lingkungan Indonesia dalam bahaya. Ini erat kaitannya antara buruknya pola hidup dengan lemahnya penegakan hukum bagi perusak lingkungan, dan kondisi wilayah yang memiliki pabrik lebih cenderung untuk lebih rusak lagi (saturi, 2014).

Selain itu negara juga masih melihat alam sebagai ranah eksploitatif dan pandangan mereka terhadap warga disekitarnya dengan sifat penetratif. Manifestasi pandangan tersebut tercermin dari anggapan bahwa hutan adalah produsen kayu bukan sebagai sistem lingkungan (ekosistem yang sifatnya terintegrasi dengan manusia) dan masyarakat sekitar hutan cenderung diperlakukan sebagai buruh, sebagai contoh wilayah Gunung Kidul, wilayah Gunung Kidul sebelum tahun 2014 masih memprioritaskan wilayah karst sebagai tempat untuk bercocok tanam, mayoritas diantaranya ditanami palawija dan padi gogo, sebelum akhirnya terjadi proses industrialisasi yang cukup masif utamanya perusahaan semen yang menjadikan karst sebagai salah satu bahan pokoknya (Dewi, 2019).

Meski beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KWBAK) , namun eksploitasi karst sering kali tak dapat dihindarkan oleh pihak industri, pengawasan terhadap penerapan Amdal menjadi celah utama terkait perilaku eksploitasi dari perusahaan (Dewi, 2019). Kurang lebih 9,5 persen dari 155 ribu kilometer persegi area karst di indonesia telah rusak, aktivitas penambangan batu

gamping yang harusnya belum layak untuk dieksploitasi karena kedepannya batu gamping tersebut yang akan bertransformasi menjadi karst dan juga alih fungsi lahan menjadi salah satu alasan utama terjadinya kerusakan wilayah karst (Nurhadi, 2019).

Yang menjadi penyebab utama adalah adanya desentralisasi kewenangan, terkhusus dalam hal penambangan batu gamping. 20 persen dari luas wilayah 1.228.538,5 hektare bentang alam karst di Jawa terdampak kerusakan. Upaya pelestarian karst harusnya mampu menjadi prioritas utama, karena selain menjadi kantong penyimpanan cadangan air bersih, karst juga mampu menjadi daerah penyerapan karbon (Riyandi, 2016). Eksploitasi karst menyebabkan beberapa wilayah di pulau Jawa sejak awal 2017 kian marak terkena banjir serta bencana alam lainnya yang dikarenakan kurangnya wilayah penyerapan air serta buruknya kondisi lingkungan di beberapa wilayah. Walhi sebagai perwakilan FOE di Indonesia pun mengambil peran penting dalam menjawab masalah pencegahan eksploitasi karst di Indonesia (Nurhadi, 2019).

1.2 Rumusan masalah

Pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana peran Walhi dalam pencegahan eksploitasi serta internalisasi isu karst di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas intensitas pengelolaan karst di Indonesia?
2. Untuk membahas keterlibatan NGOs dalam kasus ini FOE dalam advokasi karst di Indonesia

1.4 Signifikansi

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba membahas bagaimana keterkaitan antara FOE dalam proses advokasi di Indonesia terkhusus dalam hal eksploitasi karst. Yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah bagaimana interaksi antara FOE yang ada diseluruh dunia guna mengawal isu ini. Penulis akan lebih banyak berfokus pada proses pertukaran informasi FOE yang ada disatu negara dengan negara lainnya dan bagaimana dampak proses advokasi ini terhadap warga serta lingkungan yang ada di Indonesia.

1.5 Cakupan Penelitian

Skripsi ini akan menggunakan isu proses interaksi antara FOE dengan target advokasinya dalam hal ini pemerintah Indonesia hingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakannya, selain itu penulis akan berfokus pada agenda – agenda FOE dalam memfasilitasi penanganan isu ini, fokus pada skripsi ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2018 .

1.6 Kajian Pustaka

Green Development dalam perjalanannya mendapatkan tantangan baru, hal ini tentu erat kaitannya dengan globalisasi dalam artian makin signifikannya perubahan sektor industri yang memberikan efek domino, selain itu makin berkembangnya kajian tentang Green Development juga mengambil peran besar dalam hal ini.

Dalam bukunya yang berjudul *“The Basic Of Deep Ecology”* Arne Dekke Eide Naess mengemukakan suatu sudut pandang baru yang disebutnya dengan ecosophy, ecosophy sendiri bila dijelaskan secara umum merupakan adanya prinsip non-hierarki dalam lingkungan hidup, atau secara lebih sederhana lagi ketiadaan

posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam kedudukannya, bentuk kehidupan hanya perwujudan dari keragaman dan kekayaan kehidupan itu sendiri, bukan malah suatu tingkatan yang hierarkis (Keraf, 2002).

Self – realization merupakan inti dari Ecosophy T. Menurut Naess sendiri setiap yang ada entah itu manusia, hewan, tumbuhan mempunyai hak masing – masing untuk hidup. Perwujudan diri sebagai bagian dari alam tentu akan mewujudkan diri kita sebagai makhluk ekologi yang utuh. Setiap tindakan seseorang harus dilandasi pada kesadaran bahwa tindakannya akan mempengaruhi keberadaan makhluk hidup lainnya (Næss, 2005). Namun sayangnya kesadaran ini tidak dipahami oleh cukup banyak pihak.

Sebelum lebih jauh membahas tentang Transnational Advocacy dan kaitannya dengan persoalan lingkungan. Baiknya penulis akan coba menguraikan bagaimana benang merah antara satu organisasi dengan organisasi diluar negaranya dan bagaimana pembahasannya secara lebih komprehensif, dalam jurnal yang ditulis oleh Finnemore and Sikkink yang berjudul “*International Norm Dynamics and Political Change*” mereka beranggapan bahwa organisasi internasional non pemerintah pasca perang dunia kedua secara garis besar muncul dengan tujuan untuk menjadi lawan dari pemikiran kaum dominan realis dalam politik yang perlahan – lahan mencoba melepaskan diri dari nilai idealisme, dan pada akhirnya konflik antara dua kelompok besar ini disebut dengan War of “ hearts and minds” (sikkink, international norm dynamics and political change, 1998).

Finnemore dan Sikkink dalam tulisannya beranggapan bahwa, banyak dari praktisi Hubungan Internasional seringkali menanggalkan nilai – nilai normatif yang

seharusnya tetap ada, hal ini banyak dilandasi karena kebingungan dengan pertanyaan apa yang sudah ada dan apa yang seharusnya ada. Pengejaran tentang jawaban apa yang seharusnya ada bila diurai dengan mengenyampingkan nilai normatif bisajadi berujung pada xenofobia, superioritas dan berbagai macam dampak negatif lainnya (Sikkink M. F., 1998).

Bila ditelaah lebih sederhana Finnemore dan Sikkink mencoba menyampaikan bahwa banyak pihak yang menangkap nilai – nilai idealism dan normatif seringkali harus dikesampingkan dan sayangnya hal ini didasarkan pada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun kesejahteraan tersebut dikejar dengan awal yang buruk, yakni seringkali dengan tidak mensejahterakan atau bahkan merebut kesejahteraan masyarakat. Dan inilah alasan mengapa Finn dan Sikkink mencoba untuk mendorong semua pihak untuk memahami pentingnya kedua hal tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang Green Development, W.M. Adams mencoba menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Green Development 3rd edition*” seringkali kesadaran untuk memerhatikan perubahan iklim justru muncul dari masyarakat – masyarakat kecil, utamanya petani, nelayan dan berbagai kelompok lainnya, pemerintah enggan untuk terjun lebih dalam dengan hal ini, karena hal ini dianggap dapat mengurangi pendapatan negara dengan sangat signifikan, sedangkan kelompok dari masyarakat kelas bawah tadi senantiasa mengawal perubahan iklim karena mereka lebih akrab dengan kondisi tersebut, atau mereka mereka terkena dampaknya secara langsung melalui fenomena alam seperti kekeringan, gelombang panas, perubahan migrasi serangga dan banyak dampak buruk lainnya, dia

mengistilahkan ini sebagai “orang miskin yang mempelajari nasibnya” (adams, 2009).

Melihat peran pemerintah yang cukup minim untuk mengatasi persoalan lingkungan, maka tidak sedikit individu – individu diberbagai belahan dunia yang kemudian membentuk gerakan secara kolektif dan kemudian membentuk NGO dan saling terkoneksi dengan NGO – NGO di luar negaranya dan seringkali bergerak secara terstruktur.

Michele M. Betsill and Elisabeth Corell dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to NGO diplomacy*” mereka beranggapan bahwa peran NGO kian lama makin memiliki peranan dalam mempengaruhi bahkan menekan pemerintah dalam membuat kebijakannya, utamanya ketika berbicara tentang isu lingkungan. NGO yang bergerak di sektor lingkunganpun makin menyeruak pasca konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 yang awalnya hanya sekitar 250 NGO dan tercatat ditahun 1992 terdapat lebih dari 1400 NGO terakreditasi yang bergerak dalam bidang lingkungan (Corell, introduction to NGO diplomacy, 2008).

1.7 Landasan Teori/ Konsep/ Pendekatan

Dewasa ini politik internasional tidak lagi berbicara hanya tentang negara – negara saja, sudah banyak macam bentuk variasi didalamnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, lain diantaranya adalah globalisasi, mudahnya langkah interaksi sebuah kelompok atau bahkan individu yang satu dengan individu lainnya menjadi salah satu penyebab utama dari munculnya aktor non negara dalam hubungan internasional.

NGOs mengambil peranan penting dalam hal ini, terlebih ketika berbicara tentang pengambilan kebijakan dari pemerintahan di sebuah negara, Keck dan Sikkink menyebut formula tersebut sebagai jaringan advokasi transnasional. (Sikkink, 1998) Tidak hanya NGOs domestik atau internasional saja yang bisa dilibatkan disini organisasi advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan media perusahaan, asosiasi konsumen, IGOs regional atau internasional serta agen pemerintah yang memiliki sifat sukarela bersifat horizontal. (Sikkink, 1998) kelompok – kelompok tersebut memiliki peran penting dalam mengawal atau mengescalasikan sebuah isu yang terdapat di masyarakat, proses interaksi ini dapat terjadi baik dengan sifat domestik ataupun internasional.

Namun dalam advokasi transnasional aktor nonnegara domestik dan pemerintah memiliki keterbatasan bahkan seringkali terputus sehingga dianggap tidak terlalu efektif untuk mencari sebuah solusi atas konflik yang telah terjadi . (Sikkink, 1998) sehingga banyak kelompok aktivis yang berasumsi bahwa membangun jaringan dengan aktor luar negaranya akan sangat membantu dalam mengescalasikan serta pengawalan isu yang ingin mereka tekankan kepada pemerintah. Keck dan Sikkink kemudian memberikan sebuah formula yang disebut dengan “*international contact*”, “*boomerang pattern*” serta “*political entrepreneur*” guna merepresentasikan hal ini. Serta berbagai agenda internasional serta interaksi lain yang dibangun dengan skala global dapat memberikan ruang guna membentuk serta memperkuat jaringan. (Sikkink, 1998)

Jaringan advokasi transasional kemudian memanfaatkan jaringan yang telah dibangun sebelumnya guna membangun fungsi *accountability*, *political information*, *symbolic* dan *leverage politics* (Sikkink, 1998). Politik informasi sendiri merupakan sebuah kemampuan bagi masing – masing aktor guna memobilisasi informasi ke aktor lain diluar negara target, selain itu para aktor dapat membuat sebuah agenda yang bersifat simbolik dan politik informasi sebagai pemicu utama, dan dari hal ini kemudian dapat dilakukan penekanan terhadap target advokasi.

Jaringan advokasi transasional berjalan melalui beberapa tahap yang tersistematis. Diawali dengan pembuatan isu atau yang sering diistilahkan dengan *agenda setting* sehingga isu tersebutlah yang berada di permukaan dan selanjutnya mejadi sebuah perhatian utama. (Sikkink, 1998) kemudian dilanjutkan dengan respon dari negara yang menuntutnya untuk mengambil sikap atau memposisikan dirinya terhadap isu tersebut dalam forum regional bahkan internasional, selanjutnya penekanan terhadap proses atau dasar institusional dari sebuah negara (Sikkink, 1998) yang kemudian menjadi akhir dari proses advokasi pada umumnya.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan disiplin kualitatif dalam prosesnya dimana penulis tidak akan menggunakan pengumpulan data dengan kualifikasi statistik selain itu dengan tujuan untuk menyimpulkan sesuatu yang mengacu pada topik yang sedang diteliti (Idrus, 2013). Selain itu kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai fakta atau

informasi yang didapatkan baik dari aktor, aktivitas serta tempat yang menjadi subjek (Santana, 2007)

2. Subjek Penelitian

Eksplorasi karst merupakan isu yang kian luput dari perhatian sehingga perlu dilihat bagaimana dampaknya dan bagaimana peran NGOs dalam menangani isu ini, utamanya dalam skripsi ini penulis akan mengulas tentang keterlibatan FOE, selain itu penulis akan mencoba menggunakan teori Transnasional Advocacy guna membahas keterlibatan NGOs diluar negara target.

3. Alat pengumpulan data

Metode pengumpulan yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer yang mana data sekunder diambil dari proses pengumpulan dokumen maupun internet penggunaan pola kualitatif didalamnya, juga penulis coba menggunakan literatur pustaka dari beberapa bahan seperti buku, jurnal dan laporan – laporan yang terkait.

Untuk data primer sendiri penulis akan melakukan pengambilan data melalui proses interview dengan aktor – aktor yang dianggap terlibat dalam isu ini baik dari NGOs atau dari pemerintahan yang dianggap memiliki peranan dalam isu, pertanyaan dilandaskan pada kebutuhan proses penelitian.

4. Proses Penelitian

Setelah melalui tahap pengumpulan data kemudian penulis akan melakukan langkah analisis guna memberikan perspektif tersendiri serta memberi korelasi

dengan teori yang telah dipilih sebelumnya selanjutnya mengambil pemahaman dari seluruh data yang selanjutnya menghasilkan sebuah gagasan tersendiri yang dapat dinarasikan. Setelah menggaris bawahi gagasan tersebut penulis akan melakukan pembagian sub topik, yang dilanjutkan dengan pembedahan argumen (Bungin, 2009)

